

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2024 - AUDITED**

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN ACEH (567392)
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN (09)
KEMENTERIAN PERTANIAN (018)

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024



Jl. P. Nyak Makam No. 27 Kota Baru - Banda Aceh

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPSIP Aceh adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPSIP Aceh mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Negara pada BPSIP Aceh. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Banda Aceh, 31 Desember 2024
Kepala BPSIP Aceh



Firdaus, SP, M.Si
NIP. 197108052006041002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	1
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	2
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	4
II. NERACA.....	5
III. LAPORAN OPERASIONAL.....	6
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	7
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	8
A. PENJELASAN UMUM	8
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPSIP Aceh.....	8
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	8
A.3. Basis Akuntansi.....	8
A.4. Dasar Pengukuran.....	9
A.5. Kebijakan Akuntansi	9
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	15
B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	16
B.2. Belanja	17
B.3. Belanja Pegawai	18
B.4. Belanja Barang	19
B.5. Belanja Modal	20
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	21
C.1. Aset Lancar.....	22
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran.....	22
C.1.2. Piutang Bukan Pajak.....	22
C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	23
C.1.4. Piutang Bukan Pajak (NETTO)	23
C.1.5. Persediaan.....	23
C.2. Aset Tetap.....	24
C.2.1. Tanah	24
C.2.2. Peralatan dan Mesin	25
C.2.3. Gedung dan Bangunan.....	25
C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	26

C.2.5. Aset Tetap Lainnya	26
C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	27
C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	27
C.3. Piutang Jangka Panjang	28
C.4. Aset Lainnya	28
C.4.1. Aset Tak Berwujud.....	28
C.4.2. Aset Lain-lain	28
C.4.3. Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya.....	28
C.5. Kewajiban Jangka Pendek.....	29
C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga	29
C.5.2. Utang Yang Belum Ditagihkan	29
C.5.3. Uang Muka di KPPN.....	29
C.6. Ekuitas	30
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	31
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya.....	31
D.2. Beban Pegawai	31
D.3. Beban Persediaan	32
D.4. Beban Barang dan Jasa.....	33
D.5. Beban Pemeliharaan	34
D.6. Beban Perjalanan Dinas.....	34
D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	35
D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	35
D.9. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.....	36
D.10. Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Operasional	37
D.11. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	37
D.12. Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	37
D.12. Pos Luar Biasa.....	38
D.13. Surplus/ Defisit - LO	38
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	39
E.1. Ekuitas Awal	39
E.2. Surplus/Defisit-LO	39
E.3. Koreksi Yang Menambah dan Mengurangi Ekuitas.....	39
E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset	39
E.3.2. Selisih Revaluasi Aset	39
E.3.3. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	40

E.4. Transaksi Antar Entitas	40
E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)	40
E.4.2. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung	40
E.5. Transaksi Antar Entitas	41
E.6. Ekuitas Akhir	41
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA	42
F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	42
F.2. Pengungkapan Lain-lain	42
F.3. Pengungkapan Capaian Output	42



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN ACEH
JALAN PANGLIMA NYAK MAKAM NO. 27, KOTA BARU – BANDA ACEH 23125
TELEPON (0651) 7551811, FAKSIMILE (0651) 7552077
WEBSITE: aceh.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.aceh@pertanian.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPSIP Aceh yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2024 Audited sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banda Aceh, 31 Desember 2024

Kepala BPSIP Aceh

Firdaus, SP, M.Si

NIP. 197108052006041002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPSIP Aceh Semester II Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 176.141.901,00 atau mencapai 135,99% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 129.518.000,00.

Realisasi Belanja Negara TA 2024 adalah sebesar Rp. 9.775.930.209,00 atau mencapai 95,3% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 10.260.265.000,00.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 167.231.707.922,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 240.374.320,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 166.823.285.901,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 168.047.701,00.

Nilai kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 28.390.306,00 dan Rp. 167.203.317.616,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 152.811.842,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 11.096.568.634,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp. -10.943.756.792,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp. 20.537.559,00 dan Defisit Rp. -10.923.219.233,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. -10.923.219.233,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp. 168.428.601.500,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp.

-10.923.219.233,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 98.147.041,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 9.599.788.308,00 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp. 167.203.317.616,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BPSIP ACEH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 Desember 2024 DAN 31 Desember 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2024			31 Desember 2023
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	129.518.000,00	176.141.901,00	135,99	248.453.425,00
Jumlah Pendapatan		129.518.000,00	176.141.901,00	135,99	248.453.425,00
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3.	5.205.217.000,00	5.152.578.379,00	99,04	4.927.209.449,00
Belanja Barang	B.4.	4.898.567.000,00	4.466.126.830,00	91,17	3.871.357.857,00
Belanja Modal	B.5.	156.481.000,00	156.300.000,00	99,88	0,00
Jumlah Belanja		10.260.265.000,00	9.775.930.209,00	95,30	8.798.567.306,00

II. NERACA

BPSIP ACEH
NERACA
PER 31 Desember 2024 dan 31 DESEMBER 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	0,00	0,00
Piutang Bukan Pajak	C.1.2.	75.675.000,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	C.1.3.	(373.750)	0,00
Piutang Bukan Pajak (NETTO)	C.1.4.	75.301.250,00	0,00
Persediaan	C.1.5.	165.073.070,00	85.352.360,00
Jumlah Aset Lancar		240.374.320,00	85.352.360,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	148.263.738.880,00	148.263.738.880,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	8.245.262.746,00	8.220.950.324,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	24.222.491.437,00	23.946.731.437,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	288.381.000,00	288.381.000,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	60.750.000,00	60.750.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6.	0,00	222.000.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7.	-14.257.338.162,00	-12.833.628.693,00
Jumlah Aset Tetap		166.823.285.901,00	168.168.922.948,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1.	6.115.000,00	6.115.000,00
Aset Lain-lain	C.4.2.	4.128.608.981,00	4.361.608.981,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3.	-3.966.676.280,00	-4.176.874.605,00
Jumlah Aset Lainnya		168.047.701,00	190.849.376,00
Jumlah Aset		167.231.707.922,00	168.445.124.684,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1.	28.390.306,00	16.523.184,00
Uang Muka dari KPPN	C.5.2.	0,00	0,00
Utang yang Belum Ditagihkan	C.5.3.	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		28.390.306,00	16.523.184,00
Jumlah Kewajiban		28.390.306,00	16.523.184,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	167.203.317.616,00	168.428.601.500,00
Jumlah Ekuitas		167.203.317.616,00	168.428.601.500,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		167.231.707.922,00	168.445.124.684,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

BPSIP ACEH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 Desember 2024 DAN 31 Desember 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	152.811.842,00	198.576.760,00
JUMLAH PENDAPATAN		152.811.842,00	198.576.760,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	5.152.578.379,00	4.927.209.449,00
Beban Persediaan	D.3.	367.822.940,00	355.044.940,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2.082.248.359,00	2.116.457.448,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	796.801.539,00	556.981.200,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1.226.412.982,00	860.545.778,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	51.432.500,00	2.575.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	1.418.898.185,00	1.492.589.908,00
Beban Penyusutan Piutang Tak Tertagih	D.9.	373.750,00	0,00
JUMLAH BEBAN		11.096.568.634,00	10.311.403.723,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-10.943.756.792,00	-10.112.826.963,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset		-199.000.000	-59.178.335,00
Pendapatan Pelepasan Aset		23.000.000	49.876.665,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	222.000.000,00	109.055.000,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		219.537.559,00	113.305.000,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	228.080.059,00	135.900.000,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	8.542.500,00	22.595.000,00
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		20.537.559,00	54.126.665,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9.	-10.923.219.233,00	-10.058.700.298,00
SURPLUS/DEFISIT – LO		-10.923.219.233,00	-10.058.700.298,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BPSIP ACEH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
EKUITAS AWAL	E.1.	168.428.601.500,00	169.937.187.917,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-10.923.219.233,00	-10.058.700.298,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	98.147.041,00	0,00
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1.	0,00	0,00
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.2.	0,00	0,00
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.3.	98.147.041,00	0,00
LAIN-LAIN		0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	9.599.788.308,00	0,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	-1.225.283.884,00	-1.508.586.417,00
EKUITAS AKHIR	E.6.	167.203.317.616,00	168.428.601.500,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Profil dan Kebijakan Teknis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPSIP Aceh

Pembangunan pertanian memerlukan sebuah standar instrumen pertanian demi menjamin mutu dari proses dan produk hasil pertanian. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) lahir pada 21 September 2022 melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 yang memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menyelenggarakan fungsi:

Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian;
Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta standar instrumen pertanian;
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian;
Pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPSIP Aceh. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian/Lembaga.

SAKTI terdiri dari *General Ledger* dan Pelaporan (GLP) dan Aset Tetap. SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. Sedangkan Aset tetap adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik Negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

BPSIP Aceh menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPSIP Aceh dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPSIP Aceh yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPSIP Aceh adalah sebagai berikut:

Pendapatan - LRA

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan - LO

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/ atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan, sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/ atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/ DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset tetap pada ENTitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada

Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel Masa Manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penjelasan Atas Pos-
Pos Laporan
Realisasi Anggaran

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPSIP Aceh telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	104.768.000,00	104.768.000,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	21.000.000,00	21.000.000,00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	3.750.000,00	3.750.000,00
Jumlah Pendapatan	129.518.000,00	129.518.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.199.217.000,00	5.175.217.000,00
Belanja Lembur	30.000.000,00	30.000.000,00
Belanja Barang Operasional	579.540.000,00	675.935.000,00
Belanja Barang Non Operasional	1.418.125.000,00	1.304.392.000,00
Belanja Barang Persediaan	387.279.000,00	395.138.000,00
Belanja Jasa	318.514.000,00	280.764.000,00
Belanja Pemeliharaan	893.488.000,00	796.938.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	984.350.000,00	1.445.400.000,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0,00	0,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	6.481.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	150.000.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Jumlah Belanja	9.810.513.000,00	10.260.265.000,00

Penerimaan Negara
Bukan Pajak
Rp. 176.141.901,00

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.176.141.901,00 atau mencapai 135,99% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.129.518.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
Akun Pendapatan	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	104.768.000,00	107.025.000,00	102,152
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	23.000.000,00	100
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	21.000.000,00	44.286.842,00	210,89
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	3.750.000,00	1.500.000,00	40
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0,00	180.059,00	100
Jumlah	129.518.000,00	176.141.901,00	135,99

Realisasi pendapatan TA 2024 mengalami penurunan sebesar 29,10% dibandingkan TA 2023. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BPSIP Aceh adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	107.025.000,00	176.075.000,00	-39,22
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	23.000.000,00	49.876.665,00	-53,89
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	44.286.842,00	22.501.760,00	96,82
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.500.000,00	0,00	100,00

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	%
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	150.000,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	180.059,00	0,00	100,00
Jumlah	176.141.901,00	248.453.425,00	-29,10

Realisasi pendapatan PNPB senilai Rp.176.141.901,00. Namun pada Laporan Operasional senilai Rp.152.811.842,00. Sehingga terdapat selisih senilai Rp. 23.330.059,00 berupa pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin senilai Rp. 23.000.000,00 dan ditambah dengan pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara senilai Rp. 150.000,00 dan pengembalian belanja pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) senilai Rp. 180.059,00 merupakan kekurangan gaji pegawai bulan Oktober 2023 sebanyak 6 pegawai/ 15 jiwa yang disetorkan tanggal 25 Januari 2024.

Belanja
Rp. 9.775.930.209,00

B.2. Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp.9.775.930.209,00 atau 95,30% dari anggaran belanja sebesar Rp.10.260.265.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2024

Uraian	2024		
Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	5.205.217.000,00	5.155.140.182,00	99,04
Belanja Barang	4.898.567.000,00	4.466.126.830,00	91,17
Belanja Modal	156.481.000,00	156.300.000,00	99,88
Total Belanja Kotor	10.260.265.000,00	9.777.567.012,00	95,30
Pengembalian Belanja	0,00	1.636.803,00	100
Total Belanja	10.260.265.000,00	9.775.930.209,00	95,28

Dibandingkan dengan Tahun 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 11,11% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan antara lain:

1. Adanya 4 orang pegawai yang pensiun pada Tahun 2024 dan penambahan 2 orang pegawai mutasi.
2. Meningkatnya belanja barang karena adanya kunjungan Menteri Pertanian pada kegiatan penguatan kapasitas penerap standar pertanian mendukung upsus percepatan tanam peningkatan produksi padi dan jagung 2024.
3. Adanya realisasi belanja modal berupa pembelian AC dan pembuatan pagar di IPPTP Gayo.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	%
Belanja Pegawai	5.152.578.379,00	4.927.209.449,00	4,59
Belanja Barang	4.466.126.830,00	3.871.357.857,00	15,36
Belanja Modal	156.300.000,00	0,00	100,00
Total Belanja	9.775.930.209,00	8.798.567.306,00	11,11

Belanja Pegawai
Rp.5.153.503.379,00

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.5.152.578.379,00 dan Rp.4.927.209.449,00. Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,59% dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh: Adanya 4 (empat) orang pegawai yang pensiun pada tahun 2024 dan penambahan 2 (dua) orang pegawai mutasi dan adanya belanja uang lembur.

Perbandingan Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.125.166.182,00	4.932.050.153,00	3,92
Belanja Uang Lembur	29.974.000,00	0,00	100

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Jumlah Belanja Kotor	5.155.140.182,00	4.932.050.153,00	4,52
Pengembalian Belanja Pegawai	-1.636.803,00	-4.840.704,00	-66,19
Jumlah Belanja	5.152.578.379,00	4.927.209.449,00	4,59

Realisasi belanja pegawai pada LRA senilai Rp.5.152.578.379,00, dan juga pada Laporan Operasional (LO) senilai Rp.5.152.578.379,00 sehingga nilai tersebut telah sesuai.

Realisasi belanja pegawai senilai Rp. 5.152.578.379,00, sedangkan pada penjumlahan Neraca Percobaan Kas senilai Rp.5.155.140.182,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp.1.636.803,00 berupa pengembalian pembulatan gaji dan tunjangan umum PNS.

Belanja Barang
Rp.4.466.126.830,00

B.4. Belanja Barang

Realisasi belanja barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.4.466.126.830,00 dan Rp. 3.871.357.857,00. Realisasi belanja barang mengalami kenaikan sebesar 15,36% dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Meningkatnya belanja barang karena adanya kunjungan Menteri Pertanian pada kegiatan penguatan kapasitas penerap standar pertanian mendukung upsus percepatan tanam peningkatan produksi padi dan jagung 2024.

Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turu) %
Belanja Barang Operasional	661.866.892,00	742.300.000,00	-10,84
Belanja Barang Non Operasional	1.163.161.101,00	1.075.990.000,00	8,10
Belanja Barang Persediaan	354.518.650,00	339.326.000,00	4,48
Belanja Jasa	263.365.666,00	296.214.879,00	-11,09
Belanja Pemeliharaan	796.801.539,00	556.981.200,00	43,06
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.226.412.982,00	860.545.778,00	42,52

Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	4.466.126.830,00	3.871.357.857,00	15,36
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	4.466.126.830,00	3.871.357.857,00	15,36

Perjalanan dinas yang dilakukan pada bulan Desember setelah terbitnya surat penghematan belanja perjalanan dinas dilaksanakan pada kegiatan:

1. Produksi benih padi unggul terstandar (25 ton) dilakukan untuk melakukan prosesing benih padi (panen dan pascapanen) di Kabupaten Aceh Jaya.
2. Produksi benih jagung unggul terstandar (6 ton) dilakukan untuk melakukan panen dan pascapanen jagung di Kabupaten Aceh Besar.
3. Kegiatan SDM/ Manajemen Kepegawaian dalam rangka koordinasi terkait kepangkatan dan pensiun pegawai di IPPSIP Gayo.
4. Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran dilakukan untuk kegiatan pendampingan Brigade Pangan di Kabupaten Aceh Utara.
5. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan dilakukan untuk monitoring produksi benih padi di Kabupaten Aceh Jaya.
6. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan dilakukan untuk penerapan cara pembayaran langganan daya dan jasa di IPPSIP Gayo dan IPPSIP Paya Gajah.
7. Kegiatan UAPPA/B-W Kementerian Pertanian dilakukan untuk menghadiri kegiatan survey kepuasan layanan biro KBMN.

Belanja Modal
Rp. 156.300.000,00

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 156.300.000,00 dan Rp. 0,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya realisasi belanja modal berupa pembelian AC
2. Adanya realisasi belanja modal pembuatan pagar di IPPSIP Gayo.

Perbandingan Belanja Modal
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.300.000,00	0,00	100
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	0,00	100
Jumlah Belanja Kotor	156.300.000,00	0,00	100
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	156.300.000,00	0,00	100

*Penjelasan Atas Pos-
pos Neraca
Aset Lancar*

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp.0,00*

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024
Kas di bendahara Pengeluaran Berupa Uang Persediaan (UP)	0,00
Jumlah	0,00

*Piutang Bukan Pajak
Rp.75.675.000,00*

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

Saldo piutang bukan pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.75.675.000,00 dan Rp. 0,00. Piutang bukan pajak merupakan piutang yang berasal dari penerimaan Negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Rincian piutang bukan pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang Bukan Pajak	75.675.000,00	0,00
Jumlah	75.675.000,00	0,00

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Piutang bukan pajak senilai Rp.75.675.000,00 merupakan kelebihan tunjangan fungsional eks. Peneliti sebanyak 10 orang sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 18 Maret 2024 senilai Rp.

74.750.000 dan kelebihan tunjangan umum petugas belajar atas nama drh. Firda Farida Rahmah senilai Rp. 925.000,00.

*Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih – Piutang Bukan
Pajak
Rp.-373.750,00*

C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.-373.750,00 dan Rp.0,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Per September 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	74.750.000,00	0,5%	373.750,00
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	74.750.000,00		373.750,00
PNBP			
Lancar	4.630.627,00	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	4.630.627,00		373.750,00
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	79.380.627	-	373.750

*Piutang Bukan Pajak (Netto)
Rp.75.301.250,00*

C.1.4. Piutang Bukan Pajak (NETTO)

Saldo Piutang Bukan Pajak (Netto) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.75.301.250,00 dan Rp.0,00. Nilai Piutang Bukan Pajak (netto) diperoleh dari nilai Piutang Bukan Pajak dikurangi dengan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak.

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

*Persediaan
Rp.165.073.070,00*

C.1.5. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.165.073.070,00 dan Rp.85.352.360,00.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/ atau untuk dijual, dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	12.073.070,00	25.377.360,00
Bahan untuk Pemeliharaan	0,00	0,00
Bahan Baku	0,00	0,00
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	153.000.000,00	59.975.000,00
Jumlah	165.073.070,00	85.532.360,00

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPSIP Aceh per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 148.263.738.880,00 dan Rp. 148.263.738.880,00. Adapun mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	148.263.738.880,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	0,00
Mutasi Kurang	
Revaluasi Aset	0,00
Penghapusan	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	148.263.738.880,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2024	148.263.738.880,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan tanah adalah berupa:

Tanah
Rp.148.263.738.880,00

Reklasifikasi Masuk atas tanah kebun percobaan yang berlokasi di Bener Meriah yang dikarenakan kesalahan pencatatan untuk luas tanah kebun dari sebelumnya seluas 142.735 m² menjadi 67.919 m².

Mutasi kurang atas nilai tanah senilai Rp. 12.085.322.000,00 (dua belas milyar delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), berasal dari:

Reklasifikasi keluar atas tanah kebun percobaan yang berlokasi di Bener Meriah yang dikarenakan kesalahan pencatatan untuk luas tanah kebun dari sebelumnya seluas 142.735 m² menjadi 67.919 m².

Peralatan dan Mesin
Rp.8.245.262.746,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BPSIP Aceh per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.245.262.746,00 dan Rp.8.220.950.324,00. Rincian mutasi peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	8.220.950.324,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	24.312.422,00
Hibah	0,00
Transfer Masuk	0,00
Koreksi Tambah	0,00
Mutasi Kurang:	
Koreksi pencatatan atas normalisasi BMN	0,00
Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-3.955.002.707,00
Saldo Per 31 Desember 2024	8.245.262.746,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-7.510.432.184,00
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	734.830.562,00

Gedung dan Bangunan
Rp.24.222.491.437,00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BPSIP Aceh per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. Rp.24.222.491.437,00 dan Rp.23.946.731.437,00. Rincian mutasi gedung dan bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	23.946.731.437,00
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	275.760.000,00
Mutasi Kurang:	
Akumulasi Penyusutan aset tetap	-976.716.880,00
Saldo Per 31 Desember 2024	24.222.491.437,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-6.662.144.404,00
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	17.560.347.033,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp.288.381.000,00

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BPSIP Aceh per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 288.381.000,00 dan Rp. 288.381.000,00. Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	288.381.000,00
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	0,00
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	0,00
Saldo Per 31 Desember 2024	288.381.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-84.761.574,00
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	203.619.426,00

Aset Tetap Lainnya
Rp.60.750.000,00

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai aset tetap lainnya yang dimiliki BPSIP Aceh per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 60.750.000,00 dan Rp. 60.750.000,00. Rincian aset tetap lainnya sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	60.750.000,00
Mutasi tambah:	
-	0,00

Mutasi Kurang:	
Akumulasi penyusutan aset tetap	0,00
Saldo Per 31 Desember 2024	60.750.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0,00
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	60.750.000,00

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp.0,00

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki BPSIP Aceh per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.222.000.000,00 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang diproses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada periode Desember 2024 telah dilakukan reklasifikasi ke penghentian penggunaan dalam operasional pemerintahan.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp.-14.257.338.162,00

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BPSIP Aceh per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.-14.257.338.162,00 dan Rp.-12.833.628.693,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	8.245.262.746,00	-7.510.432.184,00	734.830.562,00
2.	Gedung dan Bangunan	24.222.491.437,00	-6.662.144.404,00	17.560.347.033,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	288.381.000,00	-84.761.574,00	203.619.426,00
4.	Aset Tetap Lainnya	60.750.000,00	0,00	60.750.000,00
Akumulasi Penyusutan		32.816.885.183,00	-14.257.338.162,00	18.559.547.021,00

Piutang Jangka Panjang
Rp.0,00

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang jangka panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Adapun nilai piutang jangka panjang yang dimiliki BPSIP Aceh per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,00.

C.4. Aset Lainnya

Aset Tak Berwujud
Rp.6.115.000,00

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.6.115.000,00 dan Rp.6.115.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	6.115.000,00
Jumlah	6.115.000,00

Aset Lain-Lain
Rp.4.128.608.981,00

C.4.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki BPSIP Aceh per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.4.128.608.981,00 dan Rp.4.361.608.981,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPSIP Aceh serta dalam proses penghapusan dari BMN.

*Akumulasi Penyusutan/
Amortisasi Aset Lainnya*
Rp.-3.966.676.280,00

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki BPSIP Aceh per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.-3.966.676.280,00 dan Rp.-4.176.874.605,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada lampiran laporan keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	6.115.000,00	0,00	0,00
2.	Aset Lain-lain	4.361.608.981,00	-4.356.050.408,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		4.367.723.981,00	-4.356.050.408,00	0,00

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp.28.390.306,00

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.28.390.306,00 dan Rp. 16.523.184,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada BPSIP Aceh per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0,00	0,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	28.390.306,00	16.523.184,00
Jumlah	28.390.306,00	16.523.184,00

Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp.0,00

C.5.2. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga.

Uang Muka di KPPN
Rp.0,00

C.5.3. Uang Muka di KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Ekuitas

Rp.167.203.317.616,00

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.167.203.317.616,00 dan Rp.168.428.601.500,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan Negara
Bukan Pajak Lainnya
Rp.152.811.842,00*

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.152.811.842,00 dan Rp.198.576.760,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi Per 31 Desember 2024	Realisasi Per 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	107.025.000,00	176.075.000,00	-39,22
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	44.286.842,00	22.501.760,00	96,82
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.500.000,00	0,00	100
Jumlah	152.811.842,00	198.576.760,00	-23,05

Terjadinya penurunan pendapatan pada 31 Desember 2024 dibandingkan 31 Desember 2023 sejumlah 23,05% dikarenakan:

1. Berkurangnya pendapatan dari penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya.

Pendapatan Negara bukan pajak lainnya pada LO senilai Rp.152.811.842,00 namun pada LRA senilai Rp.176.141.901,00. Terdapat selisih senilai Rp.23.330.059,00 berupa Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin senilai Rp. 23.000.000,00 ditambah Pendapatan dari Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai senilai Rp.150.000,00 dan juga Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) senilai Rp. 180.059,00.

*Beban Pegawai
Rp.5.152.578.379,00*

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.5.152.578.379,00 dan Rp.4.927.209.449,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	3.591.188.400,00	3.354.418.360,00	7,06
Beban Pembulatan Gaji PNS	53.864,00	46.460,00	15,94
Beban Tunj. Anak PNS	89.713.232,00	82.126.514,00	9,24
Beban Tunj. Beras PNS	200.965.500,00	205.021.020,00	-1,98
Beban Tunj. Fungsional PNS	314.770.000,00	364.250.000,00	-13,58
Beban Tunj. PPh PNS	35.425.473,00	11.002.085,00	221,99
Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000,00	18.900.000,00	33,33
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	265.126.910,00	257.948.010,00	2,78
Beban Tunjangan Umum PNS	91.060.000,00	101.195.000,00	-9,10
Beban Uang Lembur	29.974.000,00	0,00	100
Beban Uang Makan PNS	509.101.000,00	532.302.000,00	-4,36
Jumlah	5.152.578.379,00	4.927.209.449,00	4,59

Beban Pegawai mengalami kenaikan 4,59% dikarenakan adanya 4 orang pegawai yang pensiun pada tahun 2024, dan penambahan 2 orang pegawai mutasi.

Beban Pegawai pada LO senilai Rp.5.152.578.379,00 namun penjumlahan pada Neraca Percobaan Kas senilai Rp.5.155.140.182,00. Terdapat selisih senilai Rp. 1.636.803,00 berupa pengembalian belanja pembulatan gaji PNS senilai Rp. 1.803,00 dan Pengembalian belanja tunjangan umum PNS senilai Rp. 1.635.000,00.

*Beban Persediaan
Rp.367.822.940,00*

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.367.822.940,00 dan Rp.355.044.940,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	0,00	9.682.000,00	-100
Beban Persediaan konsumsi	367.822.940,00	345.362.940,00	6,50
Beban persediaan lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	367.822.940,00	355.044.940,00	3,60

Beban persediaan mengalami kenaikan 3,60% dikarenakan adanya belanja barang persediaan barang konsumsi.

Beban Barang dan Jasa
Rp.2.082.248.359,00

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.2.082.248.359,00 dan Rp.2.116.457.448,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Bahan	929.256.101,00	672.090.000,00	38,26
Belanja Honor Output Kegiatan	9.600.000,00	0,00	100
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
Beban Barang Operasional Lainnya	150.584.470,00	167.760.000,00	0,50
Beban Barang Non Operasional Lainnya	224.305.000,00	403.900.000,00	-44,47
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	65.160.000,00	107.040.000,00	-39,13
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Profesi	25.050.000,00	34.800.000,00	-28,02
Beban Keperluan Perkantoran	428.110.000,00	467.500.000,00	-8,43
Beban Langganan Air	13.223.480,00	8.516.420,00	55,27
Beban Langganan Listrik	175.840.403,00	168.962.814,00	4,07

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Langganan Telepon	37.118.905,00	33.588.214,00	10,51
Beban Sewa	24.000.000,00	52.300.000,00	-54,11
Jumlah	2.082.248.359,00	2.116.457.448,00	0,77

Realisasi Beban Barang dan Jasa secara garis besar turun sebesar 0,77% dibandingkan tahun sebelumnya, namun pada belanja barang meningkat karena adanya kunjungan Menteri Pertanian pada kegiatan penguatan kapasitas penerap standar pertanian mendukung upsus percepatan tanam peningkatan produksi padi dan jagung 2024.

Beban Pemeliharaan
Rp.796.801.539,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.796.801.539,00 dan Rp.556.981.200,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	334.597.000,00	210.774.000,00	58,75
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	119.896.000,00	100.976.000,00	18,74
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	342.308.539,00	245.231.200,00	39,59
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	796.801.539,00	556.981.200,00	43,06

Beban Pemeliharaan mengalami kenaikan sebesar 43,06% oleh beban persediaan bahan untuk pemeliharaan dan beban pemeliharaan gedung dan bangunan serta beban pemeliharaan Gedung dan bangunan lainnya.

Beban Perjalanan Dinas
Rp.1.226.412.982,00

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.1.226.412.982,00

dan Rp.860.545.778,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	689.532.982,00	800.545.778,00	-13,87
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	536.880.000,00	60.000.000,00	794,80
Jumlah	1.226.412.982,00	860.545.778,00	42,52

Beban Perjalanan naik 42,52% dikarenakan adanya kunjungan Menteri Pertanian pada kegiatan penguatan kapasitas penerap standar pertanian mendukung upsus percepatan tanam peningkatan produksi padi dan jagung 2024.

*Beban Barang Untuk
Diserahkan Kepada
Masyarakat
Rp.51.432.500,00*

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.51.432.500,00 dan Rp.2.575.000,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	51.432.500,00	2.575.000,00	1.897,38
Jumlah	51.432.500,00	2.575.000,00	1.897,38

Beban Barang yang diserahkan kepada masyarakat naik sebesar 1.897,38% dikarenakan adanya transaksi reklasifikasi masuk perubahan akun dari akun bahan baku lainnya (10105999) menjadi akun hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat (1010501003) senilai Rp.51.432.500,00.

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp.1.418.898.185,00*

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.1.418.898.185,00 dan Rp.1.492.589.908,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	949.103.921,00	948.585.875,00	0,05
Beban Penyusutan Irigasi	8.605.944,00	8.605.944,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	22.801.675,00	16.305.555,00	39,84
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	437.326.645,00	518.032.534,00	-15,58
Jumlah	1.418.898.185,00	1.492.589.908,00	-4,94

Beban Penyusutan dan Amortisasi turun 4,94% dikarenakan penyusutan beban di Gedung Bangunan, Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah dan Peralatan dan Mesin.

*Beban Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih
Rp.373.750,00*

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.373.750 dan Rp.0,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
TA 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	373.750,00	0,00	100
Jumlah Beban	373.750,00	0,00	100

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengalami kenaikan sebesar 100 % dikarenakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Operasional
Rp.-10.943.756.792,00

D.10. Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Operasional

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama 1 (satu) periode pelaporan. Bila pendapatan lebih besar daripada beban, terjadi kondisi surplus dan sebaliknya terjadi kondisi defisit.

Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp.228.080.059,00

D.11. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Lainnya
Tahun 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	74.930.059,00	0,00	100
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	150.000,00	0,00	100
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	171.012.422,00	135.900.000,00	25,84
Jumlah Beban	228.080.059,00	135.900.000,00	81,08

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.20.537.559,00

D.12. Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Senilai Rp.20.537.559,00.

Pos Luar Biasa
Rp.0,00

D.12. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023.

Surplus/ Defisit-LO
Rp.-
10.923.219.233,00

D.13. Surplus/ Defisit - LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah defisit sebesar Rp.-10.923.219.233,00 dan Rp.-10.058.700.298,00. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp.168.428.601.500,00

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.168.428.601.500,00 dan Rp.169.937.187.917,00.

Surplus/Defisit-LO

Rp.-10.923.219.233,00

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah defisit sebesar Rp.-10.923.219.233,00 dan Rp.-10.058.700.298,00. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Koreksi Yang menambah dan Mengurangi Ekuitas

Rp.98.147.041,00

E.3. Koreksi Yang Menambah dan Mengurangi Ekuitas

Nilai koreksi yang menambah/ mengurangi ekuitas per 31 Desember 2024 senilai Rp.98.147.041,00. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas, antara lain berasal dari:

- Koreksi kesalahan atas beban periode sebelumnya, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, yang tidak berulang dan mengakibatkan penambahan beban.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LO periode sebelumnya, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, yang tidak berulang dan menambah maupun mengurangi posisi kas.
- Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan Kebijakan Akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya; dan
 - Perubahan nilai Aset tetap karena revaluasi Aset tetap.

Penyesuaian Nilai Aset

Rp.0,00

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Selisih Revaluasi Aset

Rp.0,00

E.3.2. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp.98.147.041,00

E.3.3. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.98.147.041,00 dan Rp.0,00.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi Tahun Anggaran 2024

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Gedung dan Bangunan (Pencatatan Nilai Tambah)	125.760.000,00
Gedung Bangunan (Penyusutan Transaksional)	-27.612.959,00
Jumlah	98.147.041

Transaksi Antar Entitas
Rp.9.599.788.308,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.9.599.788.308,00 dan Rp.8.550.113.881,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2024

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2024
Ditagihkan ke Entitas Lain	-9.775.930.209,00
Diterima dari Entitas Lain	176.141.901,00
Jumlah	9.599.788.308,00

Diterima Dari Entitas
Lain (DDEL)
Rp.176.141.901,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2024 saldo DDEL adalah sebesar Rp.176.141.901,00 sedangkan DKEL sebesar Rp.9.775.930.209,00.

Ditagihkan Ke Entitas
Lain (DKEL)
Rp.9.775.930.209,00

Pengesahan Hibah Langsung
Rp. 0,00

E.4.2. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan

Pengembalian Pengesahan
Hibah Langsung
Rp. 0,00

pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Nilai pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1.	Nama Pemberi Hibah 1	Barang/Jasa/Lainnya	0,00
2.	Nama Pemberi Hibah 2	Barang/Jasa/Lainnya	0,00
3.	dst... (tolong diisikan semuanya)	Barang/Jasa/Lainnya	0,00
Jumlah Nilai Hibah			0,00

Transaksi Antar Entitas
Rp.9.599.788.308,00

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.9.599.788.308,00 dan Rp.8.550.113.881,00.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Transaksi Antar Entitas TA 2024

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	176.141.901,00
Ditagihkan ke Entitas Lain	-9.775.930.209,00
Transfer Masuk	0,00
Transfer Keluar	0,00
Pengesahan Hibah Langsung	0,00
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0,00
Jumlah	9.599.788.308,00

Ekuitas Akhir
Rp. 167.203.317.616,00

E.6. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.167.203.317.616,00 dan Rp.168.428.601.500,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

1. Adanya utang kepada pihak ketiga senilai Rp.28.390.306,00 berupa belanja barang yang masih harus dibayar yaitu belanja tagihan listrik bulan November dan Desember, air dan telepon bulan Desember.
2. Adanya penerimaan kembali belanja pegawai TAYL terhadap tunjangan umum PNS senilai Rp.1.635.000,00 dan Belanja Pembulatan gaji PNS senilai Rp.1.803,00

Pengungkapan Lain- Lain

F.2. Pengungkapan Lain-lain

1. Pendapatan Negara bukan pajak lainnya pada LO senilai Rp.152.811.842,00 namun pada LRA senilai Rp.176.141.901,00. Terdapat selisih senilai Rp.23.330.059,00 berupa Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin senilai Rp. 23.000.000,00 ditambah Pendapatan dari Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai senilai Rp.150.000,00 dan juga Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) senilai Rp. 180.059,00 merupakan kekurangan gaji pegawai bulan Oktober 2023 sebanyak 6 pegawai/ 15jiwa yang disetorkan tanggal 25 Januari 2024.
2. Terdapat piutang bukan pajak senilai Rp. 75.675.000,00 yang merupakan kelebihan tunjangan fungsional eks. Peneliti yang belum disetorkan ke Kas Negara senilai Rp. 75.740.000,00 dan kelebihan tunjangan umum petugas belajar atas nama drh. Firda Farida Rahmah senilai Rp. 925.000,00.
3. Adanya perjalanan dinas yang dilaksanakan setelah terbitnya surat penghematan perjalanan dinas pada beberapa kegiatan.

Pengungkapan Capaian Output

F.3. Pengungkapan Capaian Output

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Aceh adalah sebagai berikut: (terlampir)